

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the Case of Local Government. *Pacific Accounting Review*, 262-291.
- Alwasilah, A. C. (2008). Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Cetakan keempat, Jakarta: PT. *Dunia Pustaka Jaya*.
- Australian National Audit Office (ANAO), 2012, *Development and Implementation of Key Performance Indicators to Support the Outcomes and Programs Framework*, Audit Report.
- Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Edisi I, BPFE UGM, Yogyakarta*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Friedman, M. (2005). Trying Hard is Not Good Enough. How to produce measurable improvements for customers and communities. Victoria. *Trafford Publishing*.
Excerpts Retrieved December, 23, 2007.
- Hammersley, M. (1987). Some notes on the terms ‘validity’ and ‘reliability.’ *British Educational Research Journal*, 13(1), 73–82.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). Participant recruitment. *Qualitative Research Methods. London: Sage Publications Ltd*, 81–107.
- Kementerian Keuangan. 2011. *Auditoria: Auditor Berkualitas Auditee Pasti Puas*. Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Vol V No. 25 Edisi Juli-Agustus.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketetapan No.X/MPRS/1966 tentang Kedudukan BPK RI Dikembalikan ke Posisi dan Fungsi Semula Sebagai Lembaga Tinggi Negara.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2012). *The logic model guidebook: Better strategies for great results*. California: Sage Publications, Inc.

Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I Yogyakarta Tahun 2021.

Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.*

Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN.*

Mahsun, M., Purwanugraha, H. A., & Sulistiyowati, F. (2007). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta: BPFE UGM

Mahsun, M., Purwanugraha, H. A., & Sulistiyowati, F. (2013). *Akuntansi sektor publik Edisi ke tiga.* Yogyakarta: BPFE UGM

Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). Akuntansi sektor publik. *Yogyakarta: Andi.*

Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.* Hal.

Mulyadi. 2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 LN No. 195 Tahun 1963 tentang Penggantian Penyempurnaan BPK.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 tentang Pemindahan Kedudukan BPK RI Perwakilan D.I Yogyakarta.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Sangkala, S. (2013). Menggagas Model Evaluasi Kinerja Organisasi di Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan: (sebuah Kajian dari Perspektif Manajemen Berbasis Kinerja). *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 1(2), 31–43.

Stout, Larry D. 1993. *Performance Measurament Guide*. New Jersey: Prentice-Hall.

Sugiyono, A. G. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung*: CV. Alfabeta.

Surat Pemerintah Nomor 11/OEM tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Syachbrani, W., & Akbar, R. (2013). Faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2).

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 tentang Keuangan Negara Diadakan Suatu Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Memiliki Tugas Sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Memiliki Perwakilan di Setiap Provinsi.

Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). United Kingdom: Sage Publication Ltd.